

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Menurut peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang akuntansi pemerintahan “Bentuk-bentuk laporan keuangan, khususnya laporan keuangan sektor publik di Indonesia adalah sebagai berikut, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK)”.

Laporan keuangan sektor publik adalah sebuah laporan keuangan yang disajikan untuk dijadikan sebagai pertanggung jawaban suatu lembaga pemerintah terkait dengan pengelolaan keuangannya selama periode tertentu. Tujuan dilakukannya analisis laporan keuangan sektor publik adalah untuk memperbaiki kinerja keuangan suatu pemerintah daerah atau suatu instansi dalam pembuatan keputusan serta mewujudkan pertanggung jawaban atas pendapatan yang diperoleh.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, menjelaskan tentang pengertian Laporan Keuangan yaitu Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang

menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya”. Dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses kegiatan akuntansi yang mampu memberikan informasi keuangan yang bisa dipahami oleh pemakai dan bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dimasa yang akan datang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut :

1. Relevan
Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta dapat menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
2. Andal (*Reliable*)
Informasi memiliki kualitas andal jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan laporan keuangan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar serta dapat diverifikasi.
3. Dapat Dibandingkan
Informasi yang terdapat pada laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pada entitas lain pada umumnya.
4. Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

2.1.3 Komitmen Organisasi

Menurut Putri (2019) “Komitmen organisasi merupakan Organisasi yang menerapkan komitmen organisasi pada seluruh anggota organisasi baik itu atasan maupun bawahan akan memudahkan organisasi tersebut.” Komitmen Organisasi berkaitan pada seberapa terlibat orang dan organisasi tempat mereka bekerja. Komitmen organisasi yaitu ukuran derajat kepercayaan dan keinginan karyawan dalam menyetujui tujuan lembaga dan kesetiaan untuk tinggal di dalamnya.

Komitmen Organisasional adalah derajat seseorang mengikatkan dirinya sebagai bagian dari suatu organisasi dan berkeinginan untuk berpartisipasi aktif di dalam organisasi tersebut. Tingkat komitmen karyawan terhadap organisasi menentukan seberapa baik tujuan organisasi akan tercapai. Semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin besar kemungkinan karyawan akan bertahan dalam organisasi dan meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Menurut Ariyani (2020) menyatakan bahwa terdapat 3 macam dimensi komitmen organisasi yaitu:

1. Komitmen Afektif (*Affective commitment*), yaitu berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi atau keterikatan emosional karyawan.
2. Komitmen Normatif (*Normative commitment*), yaitu suatu perasaan wajib dari pegawai untuk tetap tinggal dalam suatu organisasi karena adanya perasaan utang budi pada organisasi.
3. Komitmen Kontinu (*Continuance commitment*), yaitu yakni suatu kesadaran akan biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau ditanggung (kerugian baik finansial maupun kerugian lain) berhubungan dengan keluarnya pegawai dari organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa dimensi komitmen organisasi terdiri dari komitmen afektif, komitmen kontinu, dan komitmen finansial. Komitmen afektif dimana pegawai berkeinginan untuk terikat pada organisasinya, komitmen kontinu dimana pegawai ingin tetap tinggal karena kebutuhan finansial, dan komitmen normatif dimana pegawai merasa wajib untuk tetap tinggal karena perasaan utang budi pada organisasi tempatnya bekerja.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Rahmawati (2018) pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, kemandirian teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Maka adanya pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah kerja manusia sehingga dalam prosesnya akan lebih efektif dan efisien. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs antara lain menyampaikan pengumuman data atau pemberitahuan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menerima masukan dari masyarakat. Tujuan dilakukannya pemanfaatan teknologi informasi agar dapat menyampaikan pemberitahuan dan pengumuman serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bisa menerima masukan masyarakat. Penggunaan teknologi informasi pasti akan sangat membantu untuk mempercepat pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, agar laporan keuangan tidak kehilangan nilai informasi. Penggunaan teknologi informasi merupakan tingkat integritas tugas akuntansi.

2.1.5 Kompetensi Aparatur Pemerintah

Menurut UU No 13 Tahun 2003 pasal 1 tentang Ketenagakerjaan, “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.” Kompetensi Aparatur adalah karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, sikap, dan bertindak seseorang serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Menurut Sintia (2022) Indikator dalam kompetensi aparatur pemerintah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*)
Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tertentu). Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan.

2. Keterampilan (*skill*)
Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok.
3. Sikap (*attitude*)
Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian. Berikut penelitian terdahulu berkaitan dengan Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Okta Veranika (2022)	Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peran Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	X1: Komitmen Organisasi X2: Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah X3: Peran Auditor Internal Y: Kualitas Laporan Keuangan	Komitmen Organisasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan Peran Auditor Internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
2.	Eka Jumarni Fithri, Susi Ardiani, dan M.Husni Mubarak (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 2022)	Pengaruh Faktor Determinan Dalam Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kota Palembang	X1 : Good Governance X2 : Komitmen Organisasi X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia X4: Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Good Governance, Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah.
3.	Febrianita Hadis (2022)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber	X1 : Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi

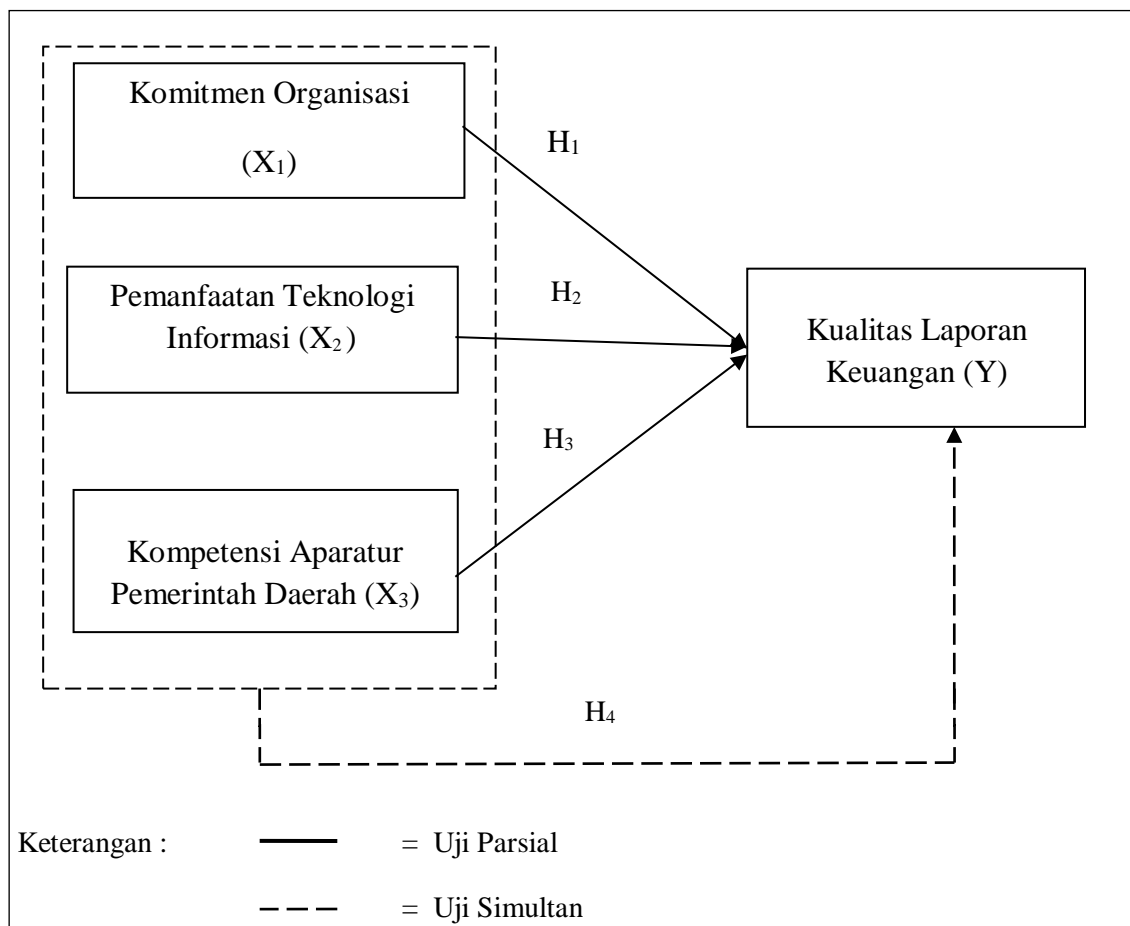
		Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	X2 : Kompetensi Sumber Daya Manusia Y : Kualitas Laporan Keuangan	Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan
4.	Purnama Sari Br Sinulingga (2022)	Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1 : Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah X2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X3: Pemanfaatan Teknologi Informasi X4: Kompetensi Aparatur Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5.	Al Fatasya (2022)	Determinasi Kualitas Laporan Keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ogan Komering Ilir	X1 : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah X2 : Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Y : Kualitas Laporan Keuangan	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Indragiri Hilir.
6.	Sandrayati (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 2021)	Determinan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan	X1 : Sumber Daya Manusia X2 : Sistem pengendalian Intern Y : Kualitas Laporan Keuangan	Sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
7.	Iga Wiratama dan Gede Agus (2021)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	X1 : Pemahaman Akuntansi X2 : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi X3 : Sistem Pengendalian Intern Y : Kualitas Laporan Keuangan	Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan
8.	Fauziyah dan Euis Mardiyatul (2019)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel	X1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X2 : Kompetensi Aparatur Pemerintah X3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Y : Kualitas Laporan Keuangan	Internal sistem pengendalian memoderasi hubungan antara Pengaruh akuntansi keuangan daerah, sedangkan Sistem pengendalian intern tidak mampu memoderasi Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan

		Moderasi (Pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Serang)		Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Daerah Laporan Keuangan Pemerintah.
9.	Rivaldy Manimpurung (2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado	X1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia X2 : Komitmen Organisasi Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kapasitas Sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas LKPD dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD di Kota Manado.
10.	Elvin Andrianto (2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dega Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)	X1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia X2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi X3 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Y : Kualitas Laporan Keuangan	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sedangkan Komitmen Organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2019:60) “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagaimana masalah yang penting”. Berikut adalah kerangka pemikiran pada penelitian ini disajikan pada gambar 2.1



Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas. Variabel dalam penelitian ini yaitu Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara parsial maupun simultan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Palembang.

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2019:99) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

2.4.1 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Palembang

Komitmen organisasi akan memberikan pengaruh yang baik terutama dalam menghasilkan laporan keuangan. Komitmen adalah tingkatan seseorang pada sebuah organisasi dimana ingin berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Pegawai dengan adanya komitmen organisasi yang baik akan tumbuh rasa kecintaan dan pekerjaannya. Nilai-nilai yang dimiliki oleh organisasi dapat menjadi alasan bagi para individu yang berada dalam suatu organisasi untuk dapat mempercayai organisasi tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah komitmen organisasi. Selain itu, kerelaan pekerja dalam membantu organisasi dalam pencapaian tujuan serta loyalitas untuk menjadi anggota organisasi juga merupakan hal yang penting untuk terus dikembangkan dan dijaga.. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Veranika (2022) bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H₁: Komitmen Organisasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi meliputi pengolahan data, informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan dapat digunakan dalam kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dengan mudah oleh masyarakat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan potensinya yang banyak dimanfaatkan dan dapat banyak menciptakan peluang bagi semua pihak akses, kelola, dan manfaat informasi

keuangan daerah dengan cepat serta akurat. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun sistem informasi manajemen dan jaringan alur kerja untuk mengaktifkan pemerintah melakukan pekerjaan secara terintegrasi dengan mempermudah kunjungan antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Gusdani (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.4.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kinerjanya. Aparatur pemerintah daerah yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu. Dengan adanya kompetensi aparatur pemerintah daerah maka waktu pembuatan laporan akan dapat dihemat. Hal ini karena aparatur pemerintah daerah tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus disusun dapat diselesaikan dan disajikan tepat pada waktunya. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4.4 Pengaruh Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pegawai yang memiliki komitmen dalam berorganisasi sangat dibutuhkan dalam lingkungan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyajian informasi yang baik dan memberikan informasi yang lebih akurat, terutama dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya komitmen setiap individu terhadap organisasi, maka setiap pegawai akan memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk menjalankan tugas organisasi dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas. Menurut Hadis (2022) “Adanya sumber daya yang memanfaatkan teknologi informasi akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan ataupun ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah daerah melalui penyusunan dan pengembangan. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dalam konteks pekerjaan dan mempengaruhi kebudayaan organisasi di lingkungan kerja.” Penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahliannya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut Fauziyah (2019) “Kompetensi aparatur pemerintah yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas”. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₄ : Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.